



Program Whistle Blower Kota Yogyakarta Tidak Berjalan

Harus ada kompensasi bagi pembocor informasi.

Iqbal Muhtarom
miqbal@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Inspektorat Kota Yogyakarta menyatakan program Whistle Blower System yang diluncurkan pemerintah sejak setahun lalu dinilai tidak berjalan. Para pegawai negeri di Pemerintah Kota Yogyakarta belum memanfaatkan sistem tersebut untuk mengawasi sekaligus melaporkan adanya upaya tindakan korupsi di lingkungan pemerintah.

Menurut Inspektorat Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat, Whistle Blower System tersebut tidak berjalan karena tidak adanya dukungan yang memadai bagi para pelapor. Karena menghadapi sejumlah risiko, menurut dia, selayaknya ada kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri yang berani sebagai pembocor informasi atas adanya upaya korupsi. "Perlu diusulkan anggaran kompensasi bagi mereka

yang berani menjadi *whistle blower*, sehingga ada keberanian," kata dia, kemarin.

Whistle Blower System diluncurkan Pemerintah Kota Yogyakarta pada Desember tahun lalu menjelang peringatan Hari Antikorupsi. Sejumlah lembaga ikut mendukung pelaksanaan sistem tersebut, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Belakangan hari, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan jajaran pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menjadi sorotan publik. Yang terakhir, misalnya, adalah soal pengadaan fasilitas peneduh pergola bernilai Rp 5,3 miliar yang membuat kepala Badan Lingkungan Hidup (nonaktif) Irfan Saosilo serta seorang bawahannya ditahan Kejaksaan Tinggi

Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian pula kasus dana bergulir program ekonomi wilayah yang menyeret seorang anggota staf Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi.

"Sejauh ini pelapor dugaan penyimpangan di lingkungan birokrasi hanya berani bicara tanpa identitas melalui layanan aduan yang sulit ditindaklanjuti karena minim bukti," ujar Wahyu. Layanan yang menampung aduan itu adalah Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Kota Yogyakarta.

Masih mandulnya sistem *whistle blower* ini mendorong Inspektorat membuat pencegahan korupsi dengan cara lebih lunak. Dalam program yang akan diluncurkan bulan depan tersebut, Inspektorat Kota Yogyakarta akan mengenalkan program Klinik Konsultasi Tata Kelola Keuangan bagi seluruh instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta agar tidak terjadi penyelewengan dana.

"Para kepala dinas dan pejabatnya, bisa mengkon-

sultasikan lebih dulu proyek yang diduga rentan bermasalah agar tak berlanjut menjadi temuan," ujar Wahyu.

Sebab, belajar dari kasus dugaan korupsi fasilitas peneduh pergola, Inspektorat mensinyalir kasus tersebut muncul karena adanya ketidaktahuan birokrat atas proyek yang ditangani secara bersama dengan perusahaan rekanan. "Misalnya ketika terjadi spesifikasi tak sesuai standar, mereka malah membiarkan," ujar dia.

Wakil ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, M. Ali Fahmi, tak setuju mengenai adanya kompensasi khusus bagi *whistle blower* di lingkungan birokrasi Kota Yogyakarta. "Bersih-tidaknya instansi tergantung masing-masing kepala dinas yang selaku pengguna dan penanggung jawab anggaran," ujar dia.

DPRD menyatakan sulit untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk kompensasi bagi *whistle blower*, karena tak ada aturan yang menjadi landasan untuk hal itu. ● PRIBADI WIGANSONO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005